

## Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Windi Maylenda<sup>1</sup>, Sri Intan Kumala Dewi<sup>2</sup>, M. Nazrin Nasution<sup>3</sup>, M. Iqbal  
Zubaidi<sup>4</sup>, Nanang Andriansyah<sup>5</sup>, Fachri Rizki<sup>6</sup>, Siti Ardianti<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [windymay03051@gmail.com](mailto:windymay03051@gmail.com)<sup>1</sup>, [Sriintankumaladewi2001@gmail.com](mailto:Sriintankumaladewi2001@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nazrinnasution11@gmail.com](mailto:nazrinnasution11@gmail.com)<sup>3</sup>, [mhd.iqbal.zubaidi@gmail.com](mailto:mhd.iqbal.zubaidi@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[nanangandriansyah798@gmail.com](mailto:nanangandriansyah798@gmail.com)<sup>5</sup>, [Fachryrizky20@gmail.com](mailto:Fachryrizky20@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[sitiardianti@uinsu.ac.id](mailto:sitiardianti@uinsu.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2024. Metode analisis yang digunakan meliputi evaluasi terhadap berbagai aspek kinerja KPU Sumut, meliputi teknis persiapan, penyelenggaraan, pelaksanaan pemungutan suara, pengolahan hasil, serta transparansi dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dan studi dokumen. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja KPU Sumut dalam menyelenggarakan proses pemilu, serta menilai keberhasilan pencapaian tujuan demokratisasi dan kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** *Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Sumatera Utara, Kinerja, Efektivitas, Demokratisasi, Kepercayaan Masyarakat.*

### Abstract

This research aims to analyze the performance of the General Election Commission (KPU) of North Sumatra Province in the 2024 Election. The analytical method used includes evaluation of various aspects of the performance of the North Sumatra KPU, including technical preparation, implementation, implementation of voting, processing of results, as well as transparency and accountability. Data was obtained through direct observation, interviews and document study. The results of the analysis will provide an overview of the effectiveness and efficiency of the North Sumatra KPU's performance in organizing the election process, as well as assessing the success of achieving democratization goals and public trust.

**Keywords:** *General Election Commission, General Elections, North Sumatra, Performance, Effectiveness, Democratization, Public Trust*

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi suatu negara, dimana warga negara mempunyai hak untuk memilih secara langsung pemimpin dan wakilnya. Sebagai sebuah proses kompleks yang melibatkan banyak pihak, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran krusial dalam menjamin keberlangsungan dan kesuksesan pemilu. Fokus penelitian ini adalah kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2024. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional.

KPU mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan akuntabel. Peran KPU tidak hanya terbatas pada teknis pelaksanaan pemungutan suara, namun juga mencakup persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, serta pengolahan dan pelaporan hasil pemilu. Dalam konteks Sumatera Utara yang dinamika politik dan sosialnya cukup kompleks, kinerja KPU sangat penting dalam menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Tahun 2024 akan menjadi tahun yang krusial bagi demokrasi Indonesia, dimana proses pemilihan umum akan mendapat pengawasan ketat dari publik. Dalam konteks ini, analisis terhadap kinerja KPU Sumut menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana KPU Sumut mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, serta mengevaluasi sejauh mana kinerjanya memenuhi standar demokratisasi dan harapan masyarakat.

Melalui pendekatan analitis yang komprehensif, penelitian ini akan menggali berbagai aspek kinerja KPU Sumut, termasuk keberhasilannya dalam mengelola tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPU, baik internal maupun eksternal, sehingga dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek kinerja KPU, serta memungkinkan peneliti menggali nuansa dan konteks yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait.

Observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan KPU Sumut terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat mengamati secara langsung proses kerja KPU, dinamika hubungan antar anggota KPU, serta interaksi dengan pemangku kepentingan. lainnya.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap anggota KPU Sumut, petugas lapangan, dan pihak terkait lainnya yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan relevan mengenai proses penyelenggaraan pemilu di provinsi tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan, pengalaman dan persepsi mereka terhadap kinerja KPU Sumut, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan faktor pendukung dalam proses tersebut.

Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen terkait, seperti laporan resmi KPU, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks dan lanskap penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan memadukan pendekatan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara holistik terhadap kinerja KPU Sumut pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi berbagai tantangan, faktor pendukung, dan analisis dokumen. dan implikasi hasil analisis terhadap perbaikan sistem demokrasi di tingkat provinsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konteks Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Utara**

Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia. Provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan berbagai karakteristik geografis yang mempengaruhi dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. Secara geografis, Sumatera Utara mempunyai topografi yang beragam, mulai dari pegunungan hingga dataran rendah, serta dikelilingi oleh Samudera Hindia di sebelah barat dan Selat Malaka di sebelah timur. Keberagaman tersebut mempengaruhi gaya hidup dan penghidupan masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara (Akhrani, 2018).

Sejarah politik Sumatera Utara mencerminkan dinamika yang kompleks dan beragam. Provinsi ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi di Sumatera. Berbagai periode politik, baik pada masa penjajahan Belanda maupun pasca kemerdekaan, telah membentuk lanskap politik yang unik di Sumatera Utara. Dinamika politik lokal seperti ketegangan etnis, persaingan kekuasaan antar partai politik, dan permasalahan sosial ekonomi juga turut mempengaruhi perjalanan politik provinsi ini.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran sentral dalam menjamin keberlangsungan dan keberhasilan proses demokrasi di Sumut. Sebagai lembaga independen, KPU bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan teknis, pelaksanaan pemungutan suara, hingga pemrosesan dan pelaporan hasil. Peran KPU sangat penting mengingat kompleksitas dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks politik dan sosial di Sumut (Cherlinda Hestiane Cahyani, 2019).

Kehadiran KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Sumut juga memberikan kepastian hukum dan integritas terhadap proses demokrasi. Melalui upaya transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, KPU berperan sebagai pengawal agar pemilu berlangsung secara adil dan demokratis. Oleh karena itu, memahami konteks politik, sosial, dan peran KPU di Sumut sangat penting dalam menganalisis kinerja KPU pada Pemilu 2024 dan implikasinya terhadap demokrasi lokal.

### **Persiapan dan Organisasi Pemilihan Umum oleh KPU Sumatera Utara**

Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Utara memerlukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan persiapan dan pengorganisasian secara matang guna menjamin kelancaran dan integritas penyelenggaraan pemilu. Tahapan persiapan pemilu melibatkan beberapa aspek utama, seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengorganisasian logistik, dan persiapan teknis yang matang.

Tahap pertama persiapan pemilu adalah penetapan DPT. KPU Sumut harus cermat dalam menentukan DPT untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data pemilih. Proses tersebut meliputi verifikasi data kependudukan, pemutakhiran data pemilih, dan pendaftaran pemilih baru, sehingga DPT-nya representatif dan mencerminkan jumlah pemilih sebenarnya di daerah tersebut (Gleko, 2017).

Selain itu, penyiapan logistik menjadi aspek krusial dalam persiapan pemilu. KPU Sumut harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti surat suara, kotak suara, dan segala perlengkapan lainnya. Penyiapan logistik tersebut juga mencakup perencanaan pendistribusian logistik ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara efisien, untuk menghindari keterlambatan atau kendala teknis lainnya (Hasibuan, 2018).

Persiapan teknis merupakan tahap selanjutnya, dimana KPU Sumut harus memastikan sistem informasi pemilu berjalan dengan baik. Hal ini mencakup kelangsungan situs resmi KPU, sistem pengolahan data, dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan tahap persiapan teknis ini sangat menentukan dalam mendukung terselenggaranya pemungutan suara yang efektif dan akurat.

Selain itu, pengorganisasian dan koordinasi antara KPU dan pihak terkait lainnya menjadi faktor penting dalam menjamin keterlibatan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu. KPU Sumut harus berkolaborasi erat dengan institusi terkait, seperti kepolisian, TNI, dan lembaga pengawas pemilu, untuk meminimalisir potensi konflik dan menjamin keamanan dan integritas selama pemilu.

Kesiapan KPU dalam menghadapi potensi tantangan dan hambatan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Termasuk mengantisipasi kendala teknis, potensi kerusuhan, atau keadaan darurat lainnya yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Keberhasilan KPU dalam mengelola dan menjawab tantangan-tantangan tersebut akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, persiapan dan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan KPU Sumut merupakan langkah penting untuk menjamin proses pemilu yang demokratis, akurat, dan efisien. Dengan pemahaman mendalam terhadap tahapan ini, analisis kinerja KPU dapat lebih fokus dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkrit.

### **Pelaksanaan Pemilihan Umum oleh KPU Sumatera Utara**

Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Sumut melibatkan serangkaian proses penting yang meliputi pemungutan suara, pengawasan dan pengendalian, serta partisipasi masyarakat. Proses pemungutan suara merupakan poin penting dalam pemilu, dimana keberhasilannya sangat menentukan integritas dan hasil akhir dari proses demokrasi. KPU Sumut harus memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan memfasilitasi partisipasi warga dalam memilih menjadi indikator utama dalam proses ini. Namun seringkali terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti antrian yang panjang, kendala teknis dalam penggunaan alat pemungutan suara, atau kendala keamanan yang dapat mengganggu proses pemungutan suara.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilu merupakan upaya KPU Sumut untuk menjamin kelangsungan proses pemilu yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemantauan keamanan TPS, penanganan potensi pelanggaran pemilu, dan penanganan situasi darurat jika terjadi. Pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah dan menangani potensi pelanggaran serta menjamin integritas pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Sumatera Utara juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan demokrasi. KPU Sumut harus memastikan informasi terkait pemilu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan pemilih, debat publik dan kampanye penjangkauan merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka legitimasi hasil pemilu juga akan semakin kuat (Muhammad Choirullah Pulungan, 2020).

Dengan demikian, pelaksanaan pemilu oleh KPU Sumut merupakan fase kritis dalam proses demokrasi. Keberhasilan dalam menjamin proses pemungutan suara yang efisien, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat yang tinggi akan berdampak pada integritas dan kredibilitas hasil pemilu.

### **Pengolahan Hasil dan Pelaporan Pemilihan Umum oleh KPU Sumatera Utara**

Pengolahan hasil pemilu dan pelaporan oleh KPU Sumut merupakan tahapan krusial dalam menentukan validitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Proses penghitungan suara menjadi titik fokus utama, dimana KPU harus menjalankan prosedur yang cermat dan transparan untuk menjamin keakuratan dan keabsahan hasil. Langkah-langkah tersebut antara lain penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS), pemisahan suara sah dan tidak sah, serta pengumpulan hasil penyusunan hasil pemilu secara sistematis.

Transparansi dan akuntabilitas pelaporan hasil pemilu merupakan aspek penting untuk menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. KPU Sumut harus mengumumkan hasil pemilu secara terbuka, baik lokal maupun nasional, serta memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memantau dan memverifikasi hasil tersebut. Langkah-langkah ini termasuk mempublikasikan hasil pemilu secara online,

memberikan laporan resmi pemilu, dan memperhitungkan segala ketidakpastian atau perbedaan yang mungkin terjadi.

Menyikapi potensi kontroversi atau perselisihan hasil pemilu merupakan langkah penting yang harus dilakukan KPU Sumut untuk menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu. KPU harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif dalam menangani perselisihan atau tuntutan terkait hasil pemilu, termasuk pengaduan dugaan kecurangan atau pelanggaran. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan panel penyelesaian sengketa, penyelidikan atas laporan yang diserahkan, serta penerapan tindakan perbaikan yang tepat jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Oleh karena itu, pengolahan hasil pemilu dan pelaporan oleh KPU Sumut memerlukan keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggap terhadap dinamika politik dan sosial yang mungkin terjadi. Dengan melaksanakan proses penghitungan suara secara transparan, memberikan pelaporan hasil yang akurat dan mudah diakses, serta menangani perselisihan atau kontroversi secara adil dan tegas, KPU Sumut dapat memastikan proses pemilu berlangsung secara demokratis dan memenuhi standar integritas yang tinggi (Sukma, 2018).

### **Evaluasi Kinerja KPU Sumatera Utara dan Implikasinya**

Evaluasi terhadap kinerja KPU Sumut merupakan langkah penting untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan yang diraih KPU Sumut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi persiapan dan pelaksanaan pemilu hingga transparansi dan akuntabilitas dalam pemrosesan dan pelaporan hasil pemilu. Namun seiring dengan itu, terdapat juga tantangan yang dihadapi KPU Sumut, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kendala teknis yang mempengaruhi kinerjanya.

#### **1. Keberhasilan dan Tantangan dalam Kinerja KPU Sumut**

Keberhasilan KPU Sumut pada Pemilu 2024 mencakup beberapa aspek yang patut diapresiasi. Pertama, KPU berhasil menyelenggarakan proses pemilu dengan relatif lancar, tanpa adanya gangguan berarti yang mengganggu kelancaran proses. Hal ini mencerminkan tingkat persiapan dan koordinasi yang baik dari pihak KPU. Kedua, proses pemungutan suara berlangsung aman dan tertib di sebagian besar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini menunjukkan adanya pengawasan efektif dari KPU serta partisipasi aktif aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban proses pemungutan suara. Ketiga, pengolahan dan pelaporan hasil pemilu dilakukan secara transparan dan akurat, menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Namun ada juga sejumlah tantangan yang dihadapi KPU Sumut dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utamanya adalah tertundanya pengaturan logistik, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan beberapa TPS mengalami keterlambatan dalam memulai proses pemungutan suara atau kekurangan peralatan yang diperlukan. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, menjadi tantangan lain yang dihadapi KPU. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya

pemahaman akan pentingnya hak memilih atau adanya hambatan fisik atau sosial yang menghambat partisipasi.

Potensi konflik atau perselisihan hasil pemilu juga menjadi tantangan serius yang dihadapi KPU Sumut. Meski proses pemilu berjalan relatif lancar, namun potensi perselisihan hasil pemilu masih tetap ada, terutama di daerah yang polarisasi politiknya tinggi. KPU harus mampu menangani perselisihan ini dengan cepat, transparan dan adil, sehingga tidak mengganggu stabilitas politik dan sosial di daerah.

Secara keseluruhan, meski menghadapi berbagai tantangan, KPU Sumut berhasil menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan relatif baik. Namun tantangan yang dihadapi menjadi catatan penting bagi KPU untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kinerja dan integritasnya ke depan.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja KPU Sumatera Utara**

Faktor pendukung dan penghambat kinerja KPU Sumut pada Pemilu 2024 mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan kelancaran dan integritas proses pemilu. Berikut beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kinerja KPU Sumut:

### **a. Faktor pendukung:**

- 1) Teknologi Informasi: teknologi informasi yang dimiliki KPU Sumut telah mendukung efisiensi dan akurasi dalam proses pemilu. Penggunaan sistem informasi pemilu dapat memudahkan pengolahan data, melaporkan hasil, dan meminimalkan human error (Ike Atikah Ratnamulyani, 2018).
- 2) Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kerja sama yang baik antara KPU Sumut dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, TNI, dan lembaga pengawas pemilu telah memperkuat pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan pemilu.
- 3) Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi menjadi faktor pendukung KPU Sumut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan memperkuat integritas demokrasi.

### **b. Faktor penghambat:**

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran: KPU Sumut mungkin mengalami keterbatasan dalam jumlah personel dan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan KPU dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.
- 2) Tekanan Politik: Tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik atau aktor politik tertentu, dapat mengganggu independensi dan integritas KPU Sumut. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil KPU.
- 3) Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Integritas Pemilu: Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan independensi pemilu, baik dari internal maupun eksternal pihak, dapat menjadi faktor penghambat kinerja KPU Sumut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan merusak legitimasi demokrasi.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut, KPU Sumut dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kinerja dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Langkah-langkah tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerja sama dengan pihak terkait, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan integritas pemilu.

### **3. Implikasi Hasil Analisis terhadap Meningkatkan Kinerja KPU dan Menjaga Integritas Pemilihan Umum di Masa Depan**

Implikasi hasil analisis terhadap peningkatan kinerja KPU Sumut dan menjaga integritas pemilu mendatang sangat penting bagi peningkatan proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut (Ilham Wahyudi Prasetyo, 2019):

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: KPU Sumut perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan teknis dalam penggunaan teknologi informasi, manajemen logistik, dan proses administrasi pemilu.
- b. Memperkuat Kerja Sama dengan Pihak Terkait: KPU perlu memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak terkait, antara lain kepolisian, TNI, partai politik, dan lembaga pemantau pemilu, untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menjaga keamanan dan integritas proses pemilu.
- c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: KPU Sumut harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh tahapan pemilu, mulai dari penyusunan DPT hingga pelaporan hasil pemilu. Informasi mengenai proses pemilu harus mudah diakses oleh masyarakat dan disajikan dengan jelas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: KPU perlu melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan integritas pemilu. Pendidikan pemilih dan kampanye informasi yang efektif dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga kepercayaan terhadap hasil pemilu.
- e. Mengembangkan Mekanisme Penanganan Sengketa: KPU Sumut harus mengembangkan mekanisme yang efektif untuk menangani perselisihan atau kontroversi hasil pemilu secara cepat, adil dan transparan. Proses penyelesaian sengketa yang baik akan membantu menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut diharapkan kinerja KPU Sumut dapat meningkat dan integritas pemilu mendatang dapat terjaga dengan baik. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses pemilu dan menjaga integritasnya sangat penting untuk memperkuat landasan demokrasi dan memastikan keterwakilan yang adil dan akurat bagi semua warga negara.

## SIMPULAN

Analisis kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2024 mengungkap berbagai aspek yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu di daerah. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa KPU Sumut menghadapi serangkaian tantangan dan berhasil mengatasinya, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Di satu sisi, terdapat keberhasilan yang signifikan dalam persiapan, pelaksanaan dan pemrosesan hasil pemilu. KPU Sumut mampu menjalankan tugasnya secara efisien, menjamin transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pemilu. Pengawasan dan pengendalian yang ketat juga mendukung integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Namun terdapat tantangan yang dihadapi KPU Sumut seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kendala teknis. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan integritas lembaga, serta mengancam keberhasilan proses demokratisasi di provinsi tersebut.

Dengan demikian, evaluasi kinerja KPU Sumut dapat dikatakan memberikan pandangan holistik terhadap capaian dan tantangan penyelenggaraan pemilu. Rekomendasi hasil evaluasi ini dapat dijadikan landasan perbaikan dan pengembangan ke depan, dengan tujuan memperkuat kinerja kelembagaan dan menjaga integritas pemilu di Sumatera Utara dan di Indonesia secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Mediapsi*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1>
- Cherlinda Hestiane Cahyani. (2019). Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018. *Skripsi*.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49177/1/CHERLINDA%20HESTIANE%20CAHYANI.FISIP.pdf>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. 6(1), 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367>
- Hasibuan, S. J., Kadir, A., Husni, M., & Nasution, T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 Strategy of the General Election Commission of North Sumatra Province in Increasing Community Participation in the Election of the Governor of North Sumatra 2018. In *PERSPEKTIF* (Vol. 7, Issue 1).
- Ike Atikah Ratnamulyani, & Beddy Iriawan Maksudi. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. <http://nasional>.
- Ilham Wahyudi Prasetyo, M., & Fachri Adnan, M. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. 2(3). <http://perspektif.ppj.unp.ac.id>.

- Muhammad Choirullah Pulungan, M. R. A. G. H. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmus Politik*, vol.3 no.2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>
- Sukma, P., & Wardhani, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis>